

DAMPAK ANEKSASI ISRAEL TERHADAP EKSISTENSI NEGARA PALESTINA (TINJAUAN GEOGRAFI POLITIK)

Kaslam

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar

Email : etos.kaslam@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel terus menerus terjadi. hingga saat ini. Diawali sejak masuknya yahudi dari eropa ke tanah Palestina dan hendak mendirikan negara Israel. Wilayah Palestina terus menyusut dan pemukiman – pemukiman yahudi secara ilegal terus meluas. Peristiwa ini tentunya menjadi ancaman nyata akan eksistensi negara Palestina yang hingga saat ini masih terus berjuang untuk menjadi negara berdaulat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang sejarah terbentuknya negara Israel di wilayah Palestina, bagaimana kronologi aneksasi wilayah yang dilakukan oleh Israel dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi eksistensi negara Palestina kedepannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedari awal Israel memiliki keinginan untuk mendirikan Negara di wilayah Palestina atas klaim agama. Tanah Palestina diklaim sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan bagi yahudi. Oleh karena itu, berbagai skenario dilakukan demi mewujudkan berdirinya negara Israel. Mulai dari eksodus besar-besaran hingga perang yang dilakukan untuk menguasai wilayah dan Israel berhasil menang. Atas kemenangan ini, dampaknya sangat parah bagi semua aspek kehidupan warga Palestina. Warga Palestina mengalami penderitaan yang berkepanjangan hingga saat ini, karena seluruh infrastruktur kehidupan dikuasai dan dibatasi oleh Israel. Dengan demikian, Israel leluasa menganeksasi dan mengontrol wilayah yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi terbentuknya Negara Palestina yang berdaulat.

Kata kunci: Aneksasi Wilayah, Palestina, Israel, Geografi Politik

ABSTRACT

Israel's annexation of the Palestinian territories continues to this day. It started with the entry of the Jews from Europe into Palestine and wanted to establish the state of Israel. Palestinian territories continue to shrink and illegal Jewish settlements continue to expand. This incident is certainly a real threat to the existence of a Palestinian state which is still struggling to become a sovereign state. This paper aims to find out the historical background of the formation of the state of Israel in the Palestinian territories, how the chronology of the annexation of territories carried out by Israel and how the impact on the existence of a Palestinian state in the future. The results showed that from the beginning Israel had a desire to establish a state in the Palestinian territories based on religious claims. The land of Palestine is claimed as the land promised by God to the Jews. Therefore, various scenarios were carried out in order to realize the establishment of the state of Israel. Starting from a massive exodus to a war carried out for control of the territory and Israel managed to win. This victory had a very severe impact on all aspects of Palestinian life. Palestinians suffer prolonged suffering to this day, because all the infrastructure of life is controlled and limited by Israel. Thus, Israel is free to annex and control the territory which will ultimately threaten the existence of a sovereign Palestinian State.

Keywords: Territory Annexation, Palestine, Israel, Political Geography

PENDAHULUAN

Konflik Palestina – Israel memasuki babak baru. Israel secara mengejutkan digadang-gadang akan melakukan upaya aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat pada 1 Juli 2020. Rencana ini tentunya mendapat kecaman yang sangat keras baik di internal penduduk Palestina

maupun berbagai pihak luar seperti Lembaga internasional, regional dan sebagian besar negara – negara sebagai entitas yang menginginkan perdamaian di Timur Tengah. Aneksasi wilayah tidak dibenarkan karena melanggar hukum internasional. Alasan pihak Israel adalah karena adanya kesepakatan abadi (*deal of the century*) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sebagai negara adikuasa. Dengan demikian, pihak Israel terus mengupayakan pembangunan pemukiman yahudi di Tepi Barat.

Warga Israel yang mayoritas beragama yahudi meyakini bahwa wilayah Palestina merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Keyakinan tersebut menjadikan eksodus besar-besaran warga yahudi dari penjuru dunia untuk ke Palestina sejak terjadinya perang Arab-Israel tahun 1967. Mereka secara perlahan menggusur warga Palestina secara halus maupun menggunakan kekerasan dan mulai membangun pemukiman sedikit demi sedikit. Selama beberapa decade, pemukiman yahudi terus bertambah dan berlipat ganda karena keamanan, pasokan listrik, air bersih serta kebutuhan dasar lainnya dijamin oleh pemerintah Israel.

Pemukiman-pemukiman yahudi tersebar di seluruh wilayah Palestina. Pemukiman tersebut dijaga ketat oleh tentara Israel. Mayoritas para pemukim merupakan yahudi ultraortodoks yang berasal dari keluarga dengan anggota kerabatnya besar dan miskin. Hal tersebut menjadikan mereka bergairah untuk hidup di pemukiman -pemukiman karena di iming – imingi oleh bantuan subsidi rumah murah dan bantuan – bantuan sosial lainnya yang jumlahnya sangat besar. Dengan alasan tersebut, mereka bisa meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Palestina saat ini hanya menyisakan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kedua wilayah tersebut terpisah, sehingga jalur transportasi dan pembangunan infrastruktur sangat sulit dilakukan oleh Pemerintah Palestina.

Konflik Palestina - Israel yang berkepanjangan dan rumit ini sangat sulit menemui titik tengahnya. Palestina yang terancam kedaulatan negaranya sulit untuk keluar dari masalah yang dihadapinya. Kedaulatan negara yang sangat rapuh, karena hak teritorialnya telah dirampas dan diduduki oleh Israel secara sepihak. Sedangkan warga asli Arab-Palestina harus terusir dan menyingkir dari tanah kelahirannya. Penduduk Arab-Palestina adalah pemilik tanah yang sah atas negara palestina dan menjadi warga mayoritas di negara itu. Namun, pada tahun 1948, Israel membentuk sebuah negara Yahudi di tanah Palestina. Negara yang didukung penuh oleh Amerika Serikat ini, sudah lama dicita-citakan untuk terwujud.

Sejak Israel terbentuk, maka aneksasi wilayah Palestina terus dilakukan. Israel dengan kekuatannya yang penuh ambisius menghapus segala hak-hak kaum mayoritas. Israel terus membangun pemukiman-pemukiman baru dan membuat kaum Yahudi menjadi mayoritas melalui imigrasi. Israel dengan kejamnya juga berusaha mengurangi jumlah penduduk Arab di Palestina melalui cara pembersihan etnis dengan jalan kekerasan. Tentara militer yang tersebar di segala penjuru wilayah siap mengeksekusi penduduk Palestina yang dicurigai akan memberontak atau melakukan perlawanan.

Gerakan Zionis Israel menempuh berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya dalam menganeksasi wilayah Palestina. Cara tersebut antara lain dengan melalui imigrasi orang Yahudi secara besar-besaran dari berbagai belahan dunia, khususnya Eropa dan Amerika dengan tujuan membangun masyarakat Yahudi sebagai mayoritas; merekrut petani dan buruh dari kalangan penduduk Palestina dengan menutup kesempatan kerjanya, sehingga memaksa orang Arab-Palestina bermigrasi meninggalkan tanah kelahirannya; dan cara yang lainnya adalah Israel berupaya keras mendapatkan dukungan dunia internasional seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa lainnya, agar diberi legitimasi untuk mengklaim wilayah Palestina sebagai pemilik sah.

Berkenaan dengan masalah ini, dalam konteks Islam juga dijelaskan bahwa pentingnya negara – negara muslim untuk bersiap siaga menjaga perbatasan negeri-negerinya. Dalam Al Qur'an, Surah Ali Imran ayat 200, Allah Swt, berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan (negerimu), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Menurut pendapat ulama, yang dimaksud dengan kata *murabatah* dalam ayat ini adalah pentingnya bersiap siaga di perbatasan negeri terhadap ancaman musuh, menjaga tapal batas negeri-negeri Islam, dan melindunginya dari segala macam bentuk serangan musuh yang hendak menjarah tanah serta harta kekayaan kaum Islam (Dimasyqi, 2000). Oleh karena itu, pemerintah islam pada zaman dahulu sangat menegaskan dan mengetahui dengan jelas batas wilayahnya. Penentuan batas ini sangat penting karena terkait penguasaan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan politik. Dengan demikian penguasa muslim

dapat mengetahui seberapa banyak luas kekuasaannya dan jumlah pajak yang harus dikumpulkan, eksplorasi sumber daya alam, perdagangan dan sebagainya (Brauer, 2006). Namun, hal ini tidak terjadi pada Palestina. Wilayahnya yang sangat luas harus jatuh dan dikuasai oleh Israel karena berbagai macam faktor. Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana sejarah awal mula masuknya yahudi dan mendirikan negara di Palestina, kronologi aneksasi wilayah yang dilakukan oleh Israel, upaya-upaya perdamaian dari konflik akibat perebutan wilayah hingga dampak yang terjadi akibat aneksasi wilayah terhadap eksistensi negara Palestina.

KERANGKA ANALISIS

Aneksasi wilayah merupakan salah satu konsep yang dibahas dalam geografi politik. Geografi politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan suatu wilayah. Aneksasi adalah bentuk pelanggaran hukum internasional dengan cara sebuah negara menggabungkan atau mencaplok negara lain dengan memasukkan suatu wilayah ke dalam unit politiknya. Sejumlah negara ingin memperluas wilayahnya dengan jalan aneksasi historis, meskipun tindakan ini dianggap illegal oleh PBB sebagai alat politik yang sah. Aneksasi merupakan tindakan yang dilakukan secara sepihak disertai dengan paksaan yang dilegitimasi untuk mendapatkan pengakuan umum. Aneksasi tidak dibenarkan karena penyerahan wilayah yang sepihak dan tidak melalui perjanjian (*cession*) yang sah.

Menurut Geograf Jerman Friedrich Ratzel dalam bukunya *Politische Geographie* (1897), menjelaskan konsep *Lebensraum* (ruang hidup). Konsep ini berhubungan dengan perluasan wilayah, dimana sebuah bangsa yang memiliki wilayah akan cenderung terus memiliki keinginan untuk menguasai wilayah bangsa lain. Berawal dari teori Darwin yang mengatakan bahwa '*survival for the fittest*' (yang kuatlah yang dapat bertahan hidup). Impelementasinya adalah bangsa yang kuat akan menguasai bangsa lain yang lemah melalui peperangan atau penaklukan suatu wilayah. Wilayah yang ditaklukkan akan diklaim sebagai bagian dari teritorialnya yang baru untuk memperluas kekuasaannya.

Beberapa alasan mendasar sebuah negara melakukan klaim teritorial yaitu (1) klaim strategis, dimana wilayah yang ditaklukkan memiliki letak yang sangat strategis; (2) klaim ekonomi, karena daerah yang ditaklukkan memiliki sumber daya alam yang melimpah; (3) klaim perluasan teritorial, yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan; (4) klaim geografis, menuntut daerah yang ditaklukkan merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan; (5) klaim atas dasar etnis, wilayah yang ditaklukkan memiliki etnis yang sama; (6) klaim atas

dasar agama, wilayah yang ditaklukkan memiliki agama yang sama; dan (7) klaim atas dasar faktor sejarah, wilayah yang ditaklukkan memiliki sejarah masa lampau (Prasetya, 2014).

Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan klaim wilayah negara lain yaitu (a) dengan taktik, yaitu berusaha mempengaruhi dengan halus; (b) dengan jual-beli, wilayah yang diklaim karena telah dibeli; (c) penemuan dan pendudukan daerah baru; (d) pembentukan negara-negara satelit; (e) pembentukan pemerintahan tandingan; (f) peperangan perebutan wilayah; dan (g) pelaksanaan konfrontasi (Prasetya, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sebuah jenis penelitian yang berusaha menganalisis suatu objek dengan memaparkan masalah dan situasinya untuk memperoleh gambaran yang jelas dan apa adanya. Aneksasi wilayah yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina akan dijelaskan secara deskriptif dan dilakukan analisis secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan ini bermaksud untuk melihat fakta – fakta di masa lampau yang menjadi dasar terjadinya suatu fenomena saat ini. Didalam penelitian ini akan dibahas bagaimana kronologi masuknya Israel sehingga dapat menguasai wilayah Palestina.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder terdiri atas buku-buku referensi sejarah terkait konflik Palestina - Israel, artikel-artikel ilmiah yang terbaru yang relevan dengan isu Palestina – Israel, dan berita-berita online yang kredibel dan terpercaya yang meliput konflik wilayah Palestina - Israel. Data-data tersebut dikumpulkan dengan memanfaatkan media internet dengan mengunjungi website resmi penerbit buku, artikel ilmiah dan portal berita internasional media-media online.

Teknik analisis data dilakukan dalam empat tahap, yaitu tahap pertama memilah sumber-sumber data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini akan dilakukan analisis data yang relevan dengan tema penelitian. Data yang relevan akan dikumpulkan dalam satu folder sedangkan data yang tidak relevan akan dibuang. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap kritik. Data relevan yang telah terkumpul sebelumnya, dilakukan pengujian isi kandungan yang terdapat didalamnya. Hal ini untuk memastikan keaslian, otentik, turunan atau palsu sumber data tersebut. Tahap ketiga yaitu penafsiran data. Fakta -fakta sejarah akan dihubungkan dengan masalah penelitian. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam untuk melihat keterkaitannya dengan topik pembahasan. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu penyajian hasil laporan penelitian dalam bentuk historiografi. Dalam penyusunannya,

penulis selalu menghubungkan aspek kronologi sejarah dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan lainnya, sehingga akan terbentuk rangkaian fakta sejarah yang utuh dan menyeluruh, tahap ini merupakan akhir dalam analisis data.

PEMBAHASAN

Profil Negara Palestina

Palestina merupakan salah satu Negara di Timur Tengah yang terletak di antara Laut Tengah dan Sungai Jordan. Keberadaannya masih dalam perdebatan karena hanya diakui oleh beberapa negara yang tergabung dalam Organisasi Liga Arab, OKI, ASEAN dan Gerakan Non-Blok. Saat ini, wilayah Palestina terbelah menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah yang diduduki oleh Israel dan wilayah Otoritas Palestina.

Otoritas Nasional Palestina atau Negara Palestina mengumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Negara ini kemudian memilih sistem pemerintahan berbentuk Republik Parleментар. Jika kebanyakan negara di dunia mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara yang menjajahnya, Palestina mengumumkan eksistensinya dengan mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.

Secara *de jure*, saat ini kepala negara yang berkuasa masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Akan tetapi, secara *de facto*, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat dan Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang yang terdiri dari Komite Eksekutif, Kesatuan Lembaga Penerangan, Lembaga Kemiliteran Palestina, Pusat Riset Palestina dan Pusat Tata Perencanaan Palestina. Komite Eksekutif membawahi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah Administrasi dan Masalah Kemiliteran.

Sumber pemasukan negara untuk membiayai jalannya pemerintahan berasal dari donatur negara-negara Timur Tengah, Lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Palestina juga pernah mendapatkan sumber

pemasukan dari Israel yang memungut hasil pajak. Akan tetapi terhenti, atas persetujuan Amerika Serikat sejak Hamas menjadi pemenang pemilu. Mereka khawatir hasil pajak tersebut nantinya justru dijadikan sebagai pendanaan untuk melakukan agresi terhadap Israel.

Palestina berdiri sebagai sebuah negara karena didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Proklamasi kemerdekaan negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina. Pengumuman kemerdekaan dilakukan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum internasional, eksistensi negara ini rapuh karena wilayah geografi yang masih belum jelas dan tidak mendapat pengakuan sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Akan tetapi, beberapa lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB sidang di New York pada Desember 1988, mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya akan tetapi Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.

Wilayah Palestina yang telah dirampas secara paksa oleh Israel kemudian menginisiasi Gerakan intifadah. Gerakan ini adalah bentuk perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987. Para pejuang Intifadah adalah warga sipil yang tinggal di pengungsian. Mereka diusir dari tanah dan rumah mereka untuk dijadikan pemukiman-pemukiman bagi warga Israel. Di dalam pengungsian itulah terdorong keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun. Mereka mengobarkan Intifadah untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan media barat, intifadah sering kali disalah-artikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, padahal faktanya perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.

Kronologi Aneksasi Wilayah Palestina Oleh Israel

1. Deklarasi Balfour

Pada tahun 1914, Kabinet Perang Inggris memaklumkan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyyah. Berselang dua bulan kemudian, seorang anasir zionis di kabinet Inggris bernama Herbert Henry Asquith membentuk panitia khusus untuk merumuskan kebijakan khusus terkait wilayah Kesultanan Utsmaniyyah, termasuk Palestina. Lanjutan dari pembahasan kebijakan tersebut menghendaki agar negara Kesultanan Utsmaniyyah dipecah-pecah. Negosiasi Pemerintah Inggris dan kaum zionis pun terus berlangsung, termasuk dalam sebuah konferensi yang membahas rancangan deklarasi dukungan untuk diajukan pada sidang kabinet Inggris.

Pada tahun 1917 di masa Perang Dunia I, Pemerintah Inggris lewat Menteri Luar Negeri Arthur Balfour menulis surat kepada Lord Rothschild (pemimpin komunitas Yahudi di Inggris) yang berisi tentang dukungan pembentukan “kediaman nasional” bagi bangsa Yahudi di Palestina. Pada saat itu Palestina yang masih menjadi wilayah Kesultanan Utsmaniyyah dan kala itu warga Yahudi masih menjadi kaum minoritas. Surat tersebut menjadi cikal bakal munculnya istilah Deklarasi Balfour 1917 yang diambil dari nama Menteri Luar Negeri Inggris tersebut. Deklarasi Balfour merupakan ungkapan dukungan terbuka yang pertama dari sebuah kekuatan politik dunia bagi Zionis Yahudi untuk menguasai dan mendirikan negara baru di Palestina.

Deklarasi Balfour ini juga menjadi unsur pokok dalam memorandum Penyerahan mandat Palestina kepada Inggris, yaitu sebuah dokumen yang menjadi dasar pembentukan Wilayah Mandat Palestina untuk menentukan batas Israel dan Palestina saat ini. Lewat deklarasi inilah konflik Israel dan Palestina tidak kunjung usai dan menjadi konflik terpanjang di muka bumi karena didalam isinya masih banyak perdebatan.

Wilayah Mandat untuk Palestina terdiri atas wilayah masa kini dari Yordania, Israel, Otoritas Palestina. Sebelumnya, wilayah ini merupakan Wilayah Kesultanan Utsmaniyyah yang dipercayakan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris untuk di administrasikan pada masa Perang Dunia I. Wilayah ini berbatasan dengan wilayah Mandat Inggris atas Mesopotamia, wilayah Mandat Perancis atas Lebanon, wilayah Mandat Perancis atas Suriah disebelah utara, Kerajaan Arab Saudi di sebelah timur, Kerajaan Mesir di sebelah barat daya dan Laut Tengah disebelah baratnya.

Pada tahun 1922, sensus penduduk pertama di wilayah Mandat untuk Palestina kemudian dilakukan. Hasilnya terdiri atas 589.177 muslim, 83.790 Yahudi, 71.464 Kristen

dan sisanya 7.617 beragama lain, sehingga total jumlah penduduk sebanyak 752.048 orang. Sensus penduduk kedua dilakukan 10 tahun kemudian, hasilnya terdapat 761.922 muslim, 175.138 Yahudi, 89.134 Kristen dan sisanya 10.145 beragama lain, sehingga total jumlah penduduk berjumlah 1.036.339 orang. Setelah itu, statistik penduduk kemudian dipertahankan dengan mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi serta perkiraan imigrasi ilegal.

2. Perang Pertama Arab – Israel 1948

Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pembagian wilayah mandat Britania Atas Palestina. Pembagian yang didasarkan atas Yahudi dan Arab itu sangat tidak adil, dimana Yahudi diberi wilayah sebanyak 55% dari luas total padahal penduduk yahudi waktu itu hanya 30%. Adapun selebihnya wilayah untuk Arab Palestina yang merupakan penduduk mayoritas. Yerusalem sebagai wilayah yang dianggap suci oleh penduduk Muslim, Kristen maupun Yahudi dijadikan sebagai kota internasional. Pembagian ini pun ditentang keras oleh negara – negara timur tengah dan juga banyak negeri – negeri mayoritas muslim di dunia.

Pada akhirnya persetujuan-persetujuan pun terjadi. Puncaknya saat Israel memproklamasikan diri menjadi sebuah negara pada tanggal 14 Mei 1948. Keesokan harinya Israel diserang oleh negara – negara arab seperti Lebanon, Mesir, Suriah, Yordania, Irak dan negara Arab lainnya. Peristiwa ini merupakan konflik senjata pertama antara Israel dan negara tetangga. Perang ini, dimenangkan oleh Israel dan mengokohkan eksistensinya dengan menganeksasi wilayah Palestina menjadi 70% sehingga menyebabkan penduduk Palestina mengungsi secara besar – besaran keluar dari tanah kelahirannya atau yang di kenal dengan nama peristiwa Nakbah..

3. Perang Enam Hari Tahun 1967

Setelah kemenangan pada perang 1948, kaum yahudi semakin percaya diri untuk menguasai wilayah Palestina. Eksodus besar-besaran kaum yahudi dari penjuru dunia mulai masuk ke Palestina. Mereka kemudian menguasai dan mengambil tanah, harta kekayaan penduduk Palestina yang terpaksa ditinggalkan. Adapun penduduk Palestina mengungsi ke berbagai wilayah perbatasan seperti Semenanjung Sinai yang berbatasan dengan Mesir, Dataran Tinggi Golan yang berbatas dengan Suriah, dan Tepi Barat yang berbatasan dengan Yordania.

Pada tahun 1956, Israel kembali melakukan invasi ke Semenanjung Sinai, Mesir. Tujuannya adalah supaya dibukakan jalan bagi pelayaran kapal-kapal Israel menuju Eropa. Tentu saja Mesir tidak setuju. Puncaknya terjadi perang di tahun 1967, Israel menyerang dan melumpuhkan kekuatan militer Mesir. Presiden Mesir waktu itu Gamal Abdul Nasir tidak bisa berbuat banyak, karena kekuatan pertahanan Mesir juga sangat rapuh, kemudian meminta bantuan Suriah dan Yordania. Namun perang yang terjadi selama 6 hari itu, kembali dimenangkan oleh Israel yang berhasil menewaskan sekitar 20.000 serdadu militer di pihak lawan.

Kemenangan ini membuat Israel semakin terpandang di mata dunia. Israel lebih leluasa lagi menguasai wilayah-wilayah Palestina untuk dijadikan pemukiman yahudi dari luar. Setelah beberapa bulan dari perang 1967, Israel kemudian membangun permukiman pertama, bernama Kfar Etzion, yang dibangun di Tepi Barat. Permukiman ini awalnya dibangun di wilayah strategis utama dengan alasan sebagai pangkalan militer dan berpenduduk jarang. Orang-orang Yahudi percaya bahwa tanah yang dulu menduduki permukiman itu adalah Tanah Israel sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kaumnya. Ini sebagai alibi untuk menjajah Palestina. Hingga akhirnya konflik terus terjadi karena Israel terus membangun permukiman dengan merampas secara paksa tanah penduduk Palestina. Perdamaian terus diupayakan, namun tidak kunjung membaik hingga saat ini.

4. Perjanjian Oslo 1993

Perjanjian Oslo merupakan salah satu upaya menghadirkan perdamaian di Timur Tengah. Dalam perjanjian ini, kesepakatan ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Israel dan Palestina, yang diwakili oleh pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dilansir oleh History, Perjanjian Oslo ini terbagi menjadi dua, yaitu pada 1993 (Oslo I) yang diratifikasi di Washington DC dan pada 1995 (Oslo II) diratifikasi di Taba, Mesir. Isi dan ketentuan yang disusun dari perjanjian ini tetap berlaku hingga saat ini, tetapi hubungan antara kedua belah pihak tetap tidak menuju kedamaian karena konflik berkepanjangan.

Perjanjian Oslo I (1993) terdiri atas 7 pasal. Intinya PLO setuju mengakui negara Israel secara resmi. Kemudian disisi yang lain, Israel mengizinkan Palestina untuk membentuk pemerintahan sendiri secara terbatas di Wilayah Gaza dan Tepi Barat. Perjanjian ini diharapkan menjadi cikal bakal menuju ratifikasi perjanjian damai secara formal pada kedua belah pihak demi perdamaian dan pemutusan konflik yang terjadi selama beberapa dekade. Akan tetapi, faktanya, hingga saat ini, belum menunjukkan perjanjian damai yang abadi dari perjanjian ini. Isi perjanjian masih diperdebatkan.

Perjanjian Oslo I ini diawali dengan negosiasi oleh Israel dan PLO yang dilakukan secara rahasia di Oslo, Norwegia pada 1993. Kedua belah pihak tidak ada yang secara terbuka mengakui kehadirannya pada pertemuan tersebut, karena takut menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan karena banyak orang Israel memandang PLO sebagai organisasi teroris, sehingga melakukan pertemuan dengan PLO dianggapnya melanggar larangan negara untuk bernegosiasi dengan teroris. Sementara itu, PLO, memang dari awal belum secara resmi mengakui eksistensi Israel sebagai sebuah negara, sehingga para pendukungnya akan menganggap pengakuan formal bagi negara Israel bukan tujuan yang diharapkan dari pertemuan ini.

Saat perwakilan dari PLO dan pemerintah Israel tiba di Norwegia. Camp David Accords digunakan sebagai model dan titik awal untuk negosiasi terbaru saat itu. Tujuannya adalah agar lebih mudah nantinya membangun kerangka kerja untuk pembentukan negara Palestina yang independen. Delegasi yang hadir dalam pertemuan penting ini adalah Yassir Arafat (Ketua PLO), Shimon Peres (mantan Perdana Menteri Israel), dan Yitzhak Rabin (Perdana Menteri Israel), serta Jan Egeland (Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia). Perwakilan dari Norwegia dalam hal ini bertindak sebagai mediator antara kedua belah pihak, Palestina dan Israel. Sebelum keduanya memulai pembicaraan, ada masalah yang diketahui bersama, yaitu kedua belah pihak saling mengakui kekuasaan masing-masing. Memang, hanya beberapa hari sebelum penandatanganan resmi Oslo I, kedua belah pihak menandatangani "*Letter of Mutual Recognition*", dimana PLO setuju untuk mengakui negara Israel.

Sebelum kesepakatan, memang diketahui bahwa PLO memandang sejak pembentukannya pada 1948, Israel telah melanggar beberapa hukum internasional. Sementara berdasarkan kesepakatan, Israel mengakui peran PLO sebagai "perwakilan rakyat Palestina". Selain "Surat Pengakuan Bersama," Oslo I juga menetapkan "Deklarasi Prinsip tentang Pengaturan Pemerintahan Sendiri Sementara", dengan membentuk Dewan Legislatif Palestina, dan menetapkan parameter untuk penarikan bertahap Pasukan Israel dari Gaza selama periode 5 tahun.

Kesepakatan tindak lanjut yang diatur dalam agenda Oslo I kemudian lahir perjanjian Oslo II. Pembahasannya mencakup tata kelola kota Yerusalem pada masa yang akan datang. Selain itu, dibahas juga mengenai masalah di Tepi Barat terkait perbatasan, keamanan, dan hak dari pemukim yahudi. Sedangkan masalah Palestina yang dibahas yaitu protokol

pemilihan bebas untuk kepemimpinannya. Perjanjian Oslo II kemudian ditandatangani setelah dua tahun kemudian. Israel lalu memberi Otoritas kepada Palestina untuk mengawasi Gaza dan Tepi Barat dan kendali terbatas atas sebagian wilayah. Sementara itu, Israel diberi izin untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat lalu menetapkan parameter untuk kerjasama ekonomi dan politik pada kedua pihak. Pada bagian dari perjanjian, juga terdapat peraturan yang mengatur bahwa kedua belah pihak melarang melakukan kekerasan atau konflik terhadap satu sama lain. Israel juga berhak memungut pajak dari warga Palestina yang bekerja di wilayahnya walaupun tinggal di Wilayah Pendudukan lalu memberikan sebagian pendapatannya ke Otoritas Palestina. Israel juga berhak mengawasi lalu lintas perdagangan barang dan jasa yang keluar masuk dari kedua wilayah Otoritas Palestina, Gaza dan Tepi Barat.

Perjanjian Oslo ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1998, pejabat Palestina merasa Israel melanggar isi perjanjian karena tidak segera melakukan penarikan pasukan dari Gaza dan Hebron seperti yang telah disepakati. Walaupun memang awalnya Israel memperlambat pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat atas permintaan Amerika Serikat, akan tetapi pembangunan perumahan baru di wilayah tersebut dimulai lagi secara besar-besaran pada awal tahun 2000. Kemudian, di pihak Israel menuduh kekuasaan Otoritas Palestina yang meningkat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap warganya juga meningkat. Sehingga dianggap bahwa Otoritas Palestina telah gagal dalam melakukan pengawasan secara memadai, mengidentifikasi serta menuntut tersangka teroris di Gaza dan Tepi Barat. Ketidaksesuaian praktik di lapangan ini menjadi penyebab para negosiator dari kedua belah pihak untuk berkumpul kembali di Camp David, dengan harapan untuk mengevaluasi Kesepakatan Oslo dengan perjanjian damai yang komprehensif.

Akan tetapi, sebagai pemegang kunci dalam negosiasi, Amerika Serikat memainkan peran dalam pembicaraan yang justru memperumit keadaan. Apalagi pada masa itu terjadi suksesi kepemimpinan Amerika, masa jabatan kedua Presiden Bill Clinton segera berakhir, dan digantikan oleh George W. Bush pada Januari 2001. Ditambah lagi pada September 2000, militan Palestina mendeklarasikan "Intifada Kedua," yang menyerukan peningkatan perlawanan terhadap orang Israel setelah Sharon, sebagai perdana menteri mengunjungi Temple Mount, sebuah situs yang dikeramatkan baik bagi orang Yahudi. Periode konflik di kedua belah pihak tidak bisa dihindarkan, sehingga memupuskan harapan untuk perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Hingga akhirnya, kedua belah pihak tidak lagi melakukan negosiasi yang substantif sejak saat itu. Meskipun beberapa dari ketentuan Kesepakatan Oslo

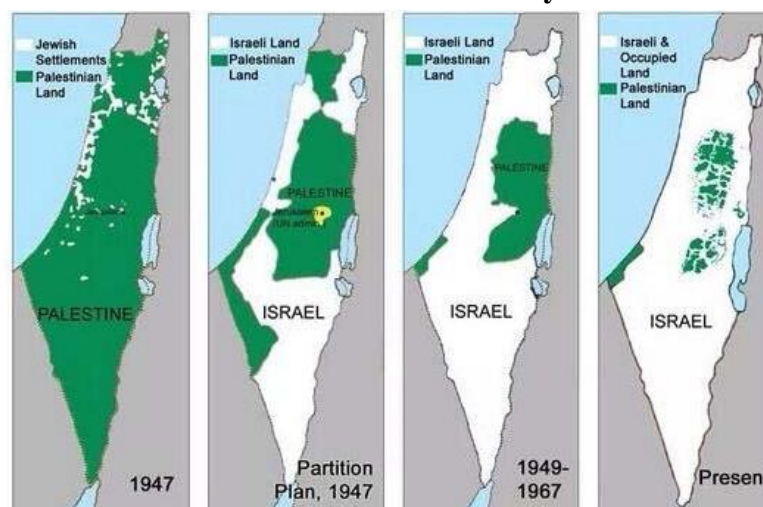
tetap berlaku, seperti peran Otoritas Palestina dalam pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat, namun lebih banyak ketentuan lainnya yang telah lama ditinggalkan.

5. Perjanjian Camp David

Pada September 1978, atas inisiatif Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya, meminta Mesir dan Israel untuk melakukan terobosan baru dengan melakukan perjanjian damai abadi. Kemudian keduanya membangun komunikasi untuk melakukan sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Camp David. Perjanjian ini dilakukan di Norwegia, yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan, Anwar Sadat sebagai Presiden Mesir dan Menachem Begin sebagai Perdana Menteri Israel. Perjanjian Camp David ini menyepakati untuk membentuk "Kerangka Kerja untuk Perdamaian di Timur Tengah" dan sekaligus mengakhiri konflik yang terus terjadi antara Mesir dan Israel. Selain itu, Perjanjian Camp David juga menyerukan untuk pembentukan Negara Palestina di wilayah Gaza dan di Tepi Barat. Akan tetapi, karena Palestina tidak dilibatkan dalam pertemuan ini, maka kesepakatan yang dihasilkan tidak secara resmi diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Peta berikut ini memperlihatkan wilayah Palestina dari tahun ke tahun yang semakin menyusut. Sementara itu, wilayah Israel semakin meluas. Pada tahun 1947, Palestina masih menguasai 95% dari total wilayah, namun pada tahun yang sama berkurang drastis menjadi 55%, dua tahun kemudian hanya menyisakan Gaza, Yerusalem dan Tepi Barat, tahun 1967 sampai sekarang ketiga wilayah tersebut semakin berkurang, karena aneksasi wilayah sedikit demi sedikit, terus dilakukan oleh Israel dengan membangun pemukiman – pemukiman illegal.

Gambar 1. Peta Perubahan Wilayah Palestina



Sumber: <https://www.islampos.com/palestina-dari-masa-ke-masa-34632/>

Dampak Aneksasi Wilayah

1. Wilayah Palestina tersisa Gaza dan tepi Barat

Sejak Israel menyatakan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, perluasan wilayah terus dilakukan. Setelah menang perang atas beberapa negara tetangganya, Israel tampil secara meyakinkan untuk merebut wilayah Palestina dan hanya menyisakan Gaza dan Tepi Barat. Gaza membentang sekitar 41 km dengan lebar 6 – 12 km² dengan total luas 365 km². Sedangkan luas wilayah Tepi Barat 5.880 km², sehingga total wilayah Palestina yaitu 6.245 km². Kedua wilayah ini terpisah satu sama lain dan menjadi ujung tombak eksistensi Negara Palestina ke depannya. Dengan demikian, Palestina harus mempertahankan kedua wilayah ini agar bisa tetap eksis.

Setelah Israel berhasil menaklukkan wilayah Palestina, pemukiman – pemukiman yahudi kemudian dibangun. Hingga saat ini wilayah Israel dibagi menjadi 6 distrik besar yaitu, (1) Distrik Utara; (2) Haifa; (3) Distrik Tengah; (4) Tel Aviv; (5) Yerusalem; dan (6) Distrik Selatan. Kemudian masing – masing distrik dibagi-bagi lagi menjadi sub distrik yang lebih kecil. Total wilayah Israel adalah 22.145 km².

2. Konflik yang terus menerus terjadi

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina menimbulkan perlawanan. Perlawanan warga sipil yang dikenal sebagai intifadah, terus dilakukan dan menyebabkan korban jiwa. Intifadah dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan tanah, rumah dan harta kekayaan dari Israel. Pemerintah Israel tidak segan-segan dalam menindak warga Palestina terutama di wilayah Tepi Barat, secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, seperti menggusur rumah warga, melarang aktivitas ibadah di Masjid Al Aqsha dan sebagainya. Dengan demikian, konflik terus terjadi hingga saat ini. Berbagai upaya perdamaian telah diupayakan, namun berakhir dengan kegagalan. Hal ini disebabkan karena pihak Israel terus melanggar apa yang telah disepakati sebelumnya. Karena setiap tindakan yang dilakukannya, diambil berdasarkan perspektif dan kebijakan pemerintah Israel yang dianggap menguntungkan. Tindakan represif juga ditunjukkan pada momentum politik seperti saat menjelang pemilihan umum. Hal ini dilakukan sebagai upaya meraih simpati warga Israel untuk kepentingan kandidat tertentu.

3. Penguasaan Infrastruktur dan fasilitas umum

Selain korban jiwa, infrastruktur dan fasilitas umum juga menjadi rusak parah akibat penyerangan yang terus terjadi. Fasilitas utama standar kehidupan seperti perumahan, jalan,

rumah sakit dan sekolah mengalami kerusakan setiap terjadi penyerangan dari pihak Israel. Hal ini memperparah kondisi warga Palestina dari berbagai aspek kehidupan. Akses terhadap pelayanan kesehatan, peluang ekonomi dan aktivitas sosial menjadi susah dan memprihatinkan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pihak Palestina dalam mempertahankan tanahnya dari aneksasi Israel adalah membangun kembali infrastruktur yang rusak serta berusaha mempercepat pembangunan wilayah-wilayah yang masih kosong dan rentan untuk dikuasai secara sepihak oleh Israel. Wilayah yang sangat rentan dikuasai adalah infrastruktur pertanian, energi dan air baik di wilayah Gaza maupun di Tepi Barat. Dampak terburuk dari penguasaan infrastruktur ini akan menyebabkan degradasi perekonomian yang parah. Warga Palestina akan kehilangan pekerjaan dan harus berfikir untuk mencari penghidupan kemana lagi.

4. Palestina menjadi penjara terbuka terbesar di dunia

Palestina bagaikan penjara terbesar di dunia. Wilayah Gaza dan Tepi Barat dikelilingi oleh tembok tinggi yang dibangun oleh Israel. Tembok tersebut memiliki tinggi 7- 8 meter dengan bagian atasnya dipasang aliran listrik dan CCTV, sehingga pergerakan warga Palestina akan terkontrol. Selain itu, Israel juga menempatkan tentara penjaga di pintu masuk perbatasan. Layaknya penjara, setiap orang yang ingin melintas, harus memiliki izin dan tentunya akan sangat sulit.

KESIMPULAN

Aneksasi wilayah yang dilakukan oleh Israel telah menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi warga Palestina. Wilayahnya terus menerus menyusut akibat tindakan sewenang-wenang Israel yang melakukan pembangunan pemukiman ilegal dengan cara merampas tanah warga Palestina. Krisis multidimensi menimpa warga Palestina karena infrastruktur yang mendukung kehidupan rusak dan sangat terbatas, seperti listrik, air bersih, fasilitas ekonomi, dan kesehatan. Saat ini Palestina yang menyisakan dua wilayah terpisah Gaza dan Tepi Barat menjadi ujung tombak dalam menjaga eksistensi Palestina. Kedua wilayah tersebut harus dilakukan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan agar Palestina segera bangkit dari keterpurukan dan bisa menjadi negara yang berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abukhater, A. (2019). *Palestine - Peace by Piece : Transformative Conflict Resolution for Land and Trans-boundary Water Resources*. Colorado: Springer Publishing.
- Biger, G. (2004). *The Boundaries of Modern Palestine, 1840–1947*. New York: Routledge Curzon.
- Islamiyah, N. (2016). Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina - Israel 1967-1995. *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 3(No. 4)*, 902 - 916.
- Junardi. (2005). Konflik Palestina - Israel: Perspektif Komunikasi. *Jurnal Mediator, Vol. 6(No. 1)*, 17-26.
- Kapahese, I. V., Anis, H., & Sinaga, T. B. (2021). Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Lex Administratum, Vo. IX(No. 3)*, 154-164.
- Karsh, E. (2002). *The Arab - Israeli Conflict : The Palestine War 1948*. Oxford: Osprey Publishing.
- Kartini, I. (2014). Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi bagi Ukraina. *Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11(No. 2)*, 27-41. doi:10.14203/jpp.v11i2.199
- Kistiyanto, M. S. (2011). Wilayah dan Penerapannya dalam Studi Geografi. *Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 16(No. 1)*, 15-32. doi:10.17977/pg.v16i1.5541
- Mardiana, V. (2020). Krisis Doklam dan Kepentingan Nasional India. *Jurnal Review of International Relations, Vol. 2(No. 2)*, 91-102.
- Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 39(No. 2)*, 390-406.
- Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES, Volume XII(Nomor 2)*, 170-181.
- Nurjaman, J. A. (2021). Trump's Peace To Prosperity Plan: Kesepakatan untuk Mewujudkan Perdamaian Israel-Palestina. *Jurnal Dharmasiswa, Vol. 1(No. 2)*, 789-804. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/16>
- Tumanggor, F. A., & Arifin, A. (2019). Dampak Kebijakan Embargo Negara Arab Terhadap Ekonomi. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 11(No. 2)*, 58-65. Retrieved from <https://talenta.usu.ac.id/politeia>
- Wirajaya, A. C., Nainggolan, M. G., & Aguw, Y. O. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina di Israel). *Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VIII(No. 4)*, 45-52.